



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

ꦩꦤꦁꦠꦺꦤꦸꦫꦺꦗꦺꦴꦗꦿꦏꦩꦠꦏꦺꦴꦧꦤꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦁꦏꦺꦴꦁꦤꦺꦤꦠꦺꦤꦸꦫꦺꦗꦺꦴꦗꦿꦏꦩꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Ext. 1117  
Faksimile (0274) 564544 Pos-el: [bpka@jogjaprovo.go.id](mailto:bpka@jogjaprovo.go.id) Laman: [bpka.jogjaprovo.go.id](http://bpka.jogjaprovo.go.id)

6 April 2026

Nomor : B/700.1.2.14 /3161/B2  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Pengendalian Gratifikasi,  
Pengungkapan Dugaan Pelanggaran  
Benturan Kepentingan dan Kejadian  
Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan  
atas RTP, Respon terhadap Risiko  
Kecurangan dan Laporan SPBE  
di lingkungan BPKA DIY Triwulan I 2026

Yth. Inspektur DIY  
di-  
YOGYAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/700.1.2/498/INS perihal Permintaan Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/ Risk Event, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE di Lingkungan Perangkat Daerah DIY pada Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan sebagaimana tersebut di atas pada lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan I Tahun 2026 dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala  
  
Wiyos Santoso, S.E., M.Acc  


Lampiran Surat

Nomor : B/700.1.2.14/3161/B2

Tanggal : 6 April 2026

1. Laporan Pengendalian Gratifikasi BPKA DIY (Triwulan I 2026)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

2. Laporan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran BPKA DIY (Triwulan I 2026)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	Adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 3 huruf e dan f serta Pasal 5 huruf a, b, g, h dan m oleh salah satu PNS pada KPPD DIY di Kab. Gunungkidul yang dilakukan pada tahun 2024 dan 2025.	Melakukan kegiatan berupa menerima titipan pembayaran PKB dari wajib pajak, namun tidak dibayarkan ke Kas daerah, serta melakukan pemalsuan dokumen notice pajak.	Telah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 13 Maret 2026	Telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Gubernur DIY melalui Kepala BKD DIY.

3. Laporan Benturan Kepentingan BPKA DIY (Triwulan I 2026)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

4. Laporan Kejadian Risiko/*Risk Event* BPKA DIY (Triwulan I 2026)

No.	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

6. Laporan Pemantauan Risiko SPBE (Triwulan I 2026)  
(terlampir)

Kepala



Wiyos Santoso, S.E., M.Acc.

## 5. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan (Triwulan I 2026)

### a. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Strategis

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah Pelaksanaan RTP
1	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah kurang optimal	Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD penghasil dalam optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah	-Melaksanakan koordinasi dan sinergi secara berkala dengan OPD penghasil pendapatan melalui rapat koordinasi, forum diskusi, dan asistensi teknis guna mengidentifikasi potensi peningkatan pajak dan retribusi daerah. -Melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi pendapatan, pertukaran data/informasi, serta mendorong optimalisasi pemungutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Selain itu, dilakukan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi OPD penghasil untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai secara optimal.	Triwulan I 2026	<a href="http://bit.ly/RTP_MR_Strategis">bit.ly/RTP_MR_Strategis</a>	1
2	Tidak tercapainya pendapatan transfer	Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan OPD Pengguna Dana Transfer dan Pemerintah Pusat (DJPK, DJPb, KPPN)	Melaksanakan koordinasi rutin dan intensif dengan OPD pengguna dana transfer serta instansi pemerintah pusat (DJPK, DJPb, KPPN) melalui rapat koordinasi, monitoring penyaluran dana, dan rekonsiliasi data guna memastikan kelengkapan persyaratan penyaluran dan optimalisasi realisasi pendapatan transfer.	Triwulan I 2026	<a href="http://bit.ly/RTP_MR_Strategis">bit.ly/RTP_MR_Strategis</a>	1
3	Penetapan tarif Retribusi Daerah terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar	Melaksanakan koordinasi dengan OPD Berpendapatan dalam melakukan analisa terhadap tarif retribusi	Melaksanakan koordinasi dan pembahasan teknis dengan OPD berpendapatan untuk menghimpun dan memvalidasi data, melakukan analisis komparatif terhadap tarif retribusi dengan kondisi pasar dan regulasi yang berlaku, serta menyusun bahan evaluasi dan rekomendasi penyesuaian tarif secara berbasis data.	Triwulan I 2026	<a href="http://bit.ly/RTP_MR_Strategis">bit.ly/RTP_MR_Strategis</a>	2
4	Sistem Pengelolaan Keuangan yang tersentral	monitoring berkala atas hasil koordinasi dengan Pusdatin dan dirjen bina keuda kemendagri dan membuat timeline yang disepakati bersama	Dalam pengelolaan keuangan yang tersentral, pertanggungjawaban dan transparansinya wajib untuk dilakukan. Salah satu metode yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Pusdatin dan Dirjen Bina Keuda Kemendagri untuk monitoring laporan keuangan secara berkala.	Triwulan I 2026	<a href="http://bit.ly/RTP_MR_Strategis">bit.ly/RTP_MR_Strategis</a>	8
5	Penetapan BLUD tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan	Dibutuhkan penilaian secara <i>on site/kunjungan</i>	-Menerbitkan Surat Permohonan Penyusunan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan BLUD DIY dan melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud. - Monitoring dan Evaluasi pada SMKN 1 Kalasan dan SMKN 2 Depok. -Melaksanakan pendampingan penyusunan pelaporan keuangan BLUD.	Triwulan I 2026	<a href="http://bit.ly/RTP_MR_Strategis">bit.ly/RTP_MR_Strategis</a>	3

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah Pelaksanaan RTP
6	Optimalisasi melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum memberikan nilai maksimal dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Pengawasan penggunaan BMD melalui identifikasi BMD Idle per OPD	Pelaksanaan Rakor Optimalisasi BMD Idle dan Surat Edaran BMD <i>Idle</i> kepada OPD Pemda DIY	Triwulan I 2026	<a href="http://bit.ly/RTP_MR_Strategis">bit.ly/RTP_MR_Strategis</a>	4

b. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RO.01.01	Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tidak akurat	1. Penguatan validasi dan klarifikasi data sebelum digunakan 2. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan terintegrasi	Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan memanfaatkan google drive untuk meningkatkan efisiensi dan keterkinian data, sekaligus memungkinkan pimpinan memantau progres penyusunan secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dan validasi dokumen menjadi lebih cepat dan akurat.	Triwulan I 2026	<a href="https://bit.ly/3PJpkbn">https://bit.ly/3PJpkbn</a>	4 (RENDAH)
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RO.01.02	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak selesai tepat waktu	1. Penguatan koordinasi dan monitoring progres penyusunan DPA 2. Penegasan batas waktu penyampaian data pendukung	Memperkuat koordinasi dan monitoring proses input data RKA/DPA/Angkas melalui google drive yang memungkinkan integrasi informasi yang lebih cepat antar bidang disertai dengan batasan waktu tertentu. Selain itu juga dilakukan pemantauan melalui rencana untuk mengetahui progres penyusunan anggaran secara real-time, serta mengurangi duplikasi data.	Triwulan I 2026	<a href="https://bit.ly/3PJpkbn">https://bit.ly/3PJpkbn</a>	4 (RENDAH)
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RO.01.03	Hasil evaluasi kinerja tidak ditindaklanjuti secara optimal	Penguatan monitoring dan pelaporan tindak lanjut	Memanfaatkan TI salah satunya dengan menggunakan google drive dalam monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.	Triwulan I 2026	<a href="https://bit.ly/3PJpkbn">https://bit.ly/3PJpkbn</a>	6 (SEDANG)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RO.01.04	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai BPKa DIY tidak tepat	Peningkatan koordinasi penyiap gaji induk dengan petugas/penyiap gaji KPPD DIY di Kabupaten/Kota	Melakukan rekonsiliasi data pegawai dan pemutakhiran variabel gaji (kenaikan pangkat, gaji berkala, atau perubahan status keluarga) bersama petugas gaji KPPD DIY di Kabupaten/Kota secara rutin sebelum penerbitan daftar gaji	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	4 (RENDAH)
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RO.01.05	Kekeliruan dalam memverifikasi dokumen keuangan SKPD	Meningkatkan pemahaman terkait aturan perpajakan dan membuat rumus bantu penghitungan pajak	Mengikuti sosialisasi aturan perpajakan terbaru serta menyusun dan menggunakan alat bantu penghitungan pajak untuk meminimalisir kesalahan input pada dokumen keuangan	Januari 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	4 (RENDAH)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RO.01.06	Akurasi dalam pencatatan	Melakukan rekonsiliasi secara berkala dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait	Melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi data realisasi antara bendahara dan pengurus barang guna memastikan seluruh transaksi di sepanjang tahun tercatat secara akurat.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	4 (RENDAH)
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	RO.01.07	Salah saji dalam laporan keuangan	Melakukan rekonsiliasi data dengan menyandingkan data sumber dengan data yang telah diolah	Melakukan validasi data dengan menyandingkan Buku Besar dengan register pada penatausahaan ataupun laporan mutasi barang untuk memastikan keakuratan angka yang tersaji dalam Laporan Keuangan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	4 (RENDAH)
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RO.01.08	Pelaporan Barang Milik Daerah tersusun tidak tepat waktu	Perlunya pendampingan bagi pengurus barang yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam pembuatan laporan BMD	Bimbingan teknis atau pendampingan langsung bagi pengurus barang dalam proses input data KIB dan KIR serta penyelesaian kendala teknis pada sistem aplikasi aset.	Februari 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	3 (RENDAH)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RO.01.09	Terjadinya keterlambatan dalam urusan kepegawaian terhadap ASN misal Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun, kenaikan Jabatan	Pembuatan buku penjagaan kepegawaian dan mengupayakan penjagaan proses kepegawaian secara kontinyu.	membuat lembar penjagaan terkait kepegawaian dan dilakukan updating setiap minggu/bulan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	3 (RENDAH)
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RO.01.10	Jumlah peralatan listrik terbatas	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RO.01.11	Jumlah ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer yang tersedia terbatas	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RO.01.12	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli terbatas	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RO.01.13	Jumlah barang cetakan yang tersedia terbatas	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	RO.01.14	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RO.01.15	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	2 (RENDAH)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RO.01.16	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif belum dapat dilaksanakan dengan optimal dengan semakin banyaknya volume arsip	Mengusulkan penambahan pegawai kepada BKD yang berkaitan dengan kearsipan	Mengoptimalkan SDM yang ada selama belum ada penambahan pegawai terkait kearsipan dari BKD	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	4 (RENDAH)
		RO.01.17	Adanya surat masuk atau surat keluar yang tidak tersampaikan	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi persuratan baik E-Office Sisminkada maupun Srikandi, disamping fisik surat masuk dan keluar tetap ada.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RO.01.18	Adanya permasalahan terhadap kualitas peralatan dan mesin yang telah dibeli	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	Memastikan seluruh peralatan dan mesin yang dibeli terdapat garansi.	Februari 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RO.01.19	Pengiriman surat/dokumen terhambat dan ketidaklengkapan administrasi pada dokumen yang membutuhkan materai	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RO.01.20	Kebutuhan riil pembayaran jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik melebihi anggaran yang tersedia	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pembayaran sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	2 (RENDAH)
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RO.01.21	1) Pengharum ruangan yang sudah habis tidak segera terisi kembali 2. Tanaman yang disewa menjadi kurang terpelihara dengan baik, sehingga kurang estetik untuk dipandang. 3. Mesin fotokopi yang disewa sering mengalami masalah penggandaan.	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	memonitoring pelaksanaan kegiatan agar pengadaan sesuai yang direncanakan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RO.01.22	Kinerja Tenaga Kebersihan antara satu dengan yang lain tidak sama, terdapat Tenaga Kebersihan yang kurang kinerjanya	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	Turut serta memantu kinerja Tenaga Kebersihan dan selalu berkoordinasi dengan penyedia jasa tenaga kebersihan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RO.01.23	Kerusakan dan tidak berfungsi kendaraan dinas jabatan di luar yang telah diperkirakan	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	melaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas jabatan sesuai dengan keluhan pemakaian serta anggaran kas	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	2 (RENDAH)
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RO.01.24	Kerusakan dan tidak berfungsi kendaraan dinas operasional di luar yang telah diperkirakan	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	melaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas operasional sesuai dengan keluhan pemakaian serta anggaran kas	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	2 (RENDAH)
		RO.01.25	Pemakaian Voucher BBM oleh pengguna kendaraan dinas tidak tertib administrasi, tidak dilengkapi dengan print out dari SPBU	Membuat kendali permintaan dan penggunaan voucher BBM secara sistematis serta meminta data penggunaan voucher BBM kepada SPBU terkait apabila diperlukan	Pengendalian pemakaian voucher BBM dengan sistem "petty cash" utk masing-masing bidang.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	2 (RENDAH)
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RO.01.26	Terdapat peralatan dan mesin yang tidak mendapat pemeliharaan	Tetap lakukan pengendalian yang sudah ada, dan monitoring terus pelaksanaan kegiatannya	melaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin sesuai dengan keluhan pemakaian serta anggaran kas	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	1 (RENDAH)
25	Pemeliharaan_Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RO.01.27	Usia gedung yang sudah relatif tua menjadikan gedung mudah mengalami kerusakan pada fasilitas umum.	Melakukan identifikasi kerusakan dan potensi kerusakan agar dapat direhabilitasi secara menyeluruh sehingga fasilitas dapat berfungsi dan tidak mengganggu kinerja instansi	mengidentifikasi kerusakan gedung kantor di setiap bidang, sehingga dapat segera ditindaklanjuti pemeliharaannya	Februari 2026	<a href="https://bit.ly/3PJPkbn">https://bit.ly/3PJPkbn</a>	4 (RENDAH)

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	RO.02.01	Penyusunan KUA dan PPAS tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses RKPDP sehingga dalam penyusunan KUA dan PPAS tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	RO.02.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses Perubahan RKPDP sehingga dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	RO.02.03	Data DPA merupakan aliran data dari RKA pada tahap penganggaran, tidak dapat dilakukan koreksi atas verifikasi DPA-SKPD	Penyusunan DPA dan DPPA SKPD sangat bergantung pada proses sebelumnya yaitu Penyusunan Perda dan Pergub APBD/PAPBD sehingga disiplin waktu sangat penting diluar kebijakan dan sistem yang ada.	1) Menyusun anggaran kas dan DPA 2026 2) Menerbitkan SPD Semester 1	Januari s.d Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	9 (Tinggi)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	RO.02.04	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	1.Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses RKPD sehingga dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2. Mengendalikan Program, kegiatan, dan subkegiatan pada RAPBD sehingga tidak mengalami perubahan	Distribusi Dokumen APBD TA 2026	Januari 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	8 (sedang)
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	RO.02.05	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	1.Mengoptimalkan proses perencanaan sedari awal yaitu pada proses Perubahan RKPD sehingga dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tidak ada perubahan dan tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 2. Mengendalikan Program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan P-APBD sehingga tidak mengalami perubahan	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Januari - Februari 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	8 (sedang)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	RO.02.06	Pengelolaan keuangan daerah tidak efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lain sesuai PMK dan Permendagri</li> <li>- Mengikutsertakan narasumber dari Kemendagri pada tahap penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lain sesuai PMK dan Permendagri</li> <li>- Konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait jika ada permasalahan termasuk dengan APIP</li> </ul>	- Menerbitkan Surat Permohonan Penyusunan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan BLUD DIY dan melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	6 (sedang)
		RO.02.07	Terhambatnya penyerapan APBD	Ketepatan waktu penyusunan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerbitkan nota dinas terkait dengan Penunjukan Bendahara Pengganti, Pengangkatan KPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Peternakan, Penetapan PJ dan Bendahara BOS, dan Penetapan Bendahara T.A. 2026.</li> <li>- Menyusun Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2026.</li> </ul>	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	6 (sedang)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	RO.02.08	Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat</li> <li>- Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	-	-	-	-
8	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	RO.02.09	Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat</li> <li>- Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	-	-	-	-

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
9	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	RO.02.10	Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	- Meningkatkan Koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat - Meningkatkan Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	RO.02.11	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Dana Dekon dan TP tidak dapat disusun tepat waktu	- Proaktif menghubungi Satker dan mengakses aplikasi SAKTI secara langsung dan berkoordinasi dengan DJPB untuk konsolidasi data. - Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait data Laporan Keuangan Audited.	Mengeluarkan Permohonan Data LRA Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2025	bulan Februari 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	9 (Tinggi)
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	RO.02.12	Kesalahan penghitungan gaji yang menyebabkan kelebihan/kekurangan perhitungan potongan fihak ketiga	Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Taspen, BPJS Kesehatan	Melakukan rekonsiliasi dengan Taspen dan BPJS Kesehatan untuk pemotongan dan penyetoran IWP 1% dan IWP 8% bulan Caturwulan III 2025	Januari s.d Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	4 (Rendah)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
12	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	RO.02.13	Terjadinya selisih data penerimaan dan pengeluaran kas dari rekening kas daerah serta pemungutan dan pemotongan SP2D	Koordinasi dilakukan bersama Bank BPD untuk lebih efektif menyamakan pengelompokan data	Melakukan kroscek harian atas transaksi yang tercatat di SIPD dengan data kas bank	Januari s.d Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	3 (Rendah)
13	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	RO.02.14	Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan serta OPD	-	-	-	-
14	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	RO.02.15	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terlambat disusun dan diserahkan ke BPK	Koordinasi dengan menjadwalkan secara rutin rekonsiliasi dengan OPD dan Bidang-bidang yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan serta melakukan pendampingan terhadap petugas penyusun laporan keuangan OPD.	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan UnAudited Pemda DIY TA 2025 dengan OPD dan Inspektorat	Februari 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	6 (Sedang)
15	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	RO.02.16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Terlambat disusun	Menjadwalkan koordinasi secara berkala dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
16	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	RO.02.17	Laporan Tindak Lanjut LHP BPK tidak ditindaklanjuti oleh OPD	Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan mitra-mitra yang terlibat	-	-	-	-
17	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	RO.02.18	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah tidak tersampaikan ke pihak tertuntut	Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan mitra-mitra yang terlibat	-	-	-	-
18	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	RO.02.19	Petugas akuntansi melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan prosedur akuntansi dalam menjalankan tugasnya.	Melaksanakan monev rutin dengan penyusun laporan keuangan.	-	-	-	-
19	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	RO.02.20	Pengelolaan keuangan BLUD terkendala dan tidak dapat melaksanakan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan	- Melakukan koordinasi dengan BLUD dan OPD terkait lainnya - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina BLU dan instansi terkait lainnya -	- Monitoring dan Evaluasi pada SMKN 1 Kalasan dan SMKN 2 Depok. - Melaksanakan pendampingan penyusunan pelaporan keuangan BLUD.	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	4 (rendah)
20	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	RO.02.21	Penurunan kinerja BUMD milik Pemda DIY	Melaksanakan rapat pembinaan triwulanan dan semesteran.	- Pembahasan permasalahan BUKP DIY. - Pelaksanaan audit KAP atas BUKP DIY masih dalam proses.E28	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	6 (sedang)
		RO.02.22	Kinerja BUKP tidak optimal	- Menerbitkan Peraturan Gubernur DIY tentang Sistem dan Prosedur Kredit.	-	-	-	-

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
		RO.02.23	Keterlambatan dan ketidaksesuaian dokumen BUMD maupun BUKP	Melaksanakan rapat pembinaan BUMD triwulanan dan semesteran. Serta rapat pembinaan BUKP secara bulanan	Evaluasi triwulan IV BUMD DIY.	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	6 (sedang)
21	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	RO.02.24	Setoran Pengembalian Sisa Belanja atas penyaluran Bantuan Keuangan masih sulit diidentifikasi	Melakukan sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dari berbagai pihak yang turut mengampu pelaksanaan kegiatan baik OPD di Pemda DIY maupun Kelurahan	Menyelenggarakan pertemuan teknis dengan OPD pengampu dan pihak Kelurahan, terkait dengan mekanisme pencairan, pelaporan setoran pengembalian sisa belanja.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	4 (Rendah)
22	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	RO.02.25	Waktu dan tujuan penggunaan dana darurat belum dapat ditentukan	Koordinasi dengan pejabat terkait secara kontinyu dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan	Belum dilakukan karena tidak ada usulan penggunaan Dana Darurat dan Mendesak.	-	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	-
23	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	RO.02.26	Keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	peningkatan kemampuan SDM dan jalinan koordinasi yang baik antara para pihak terkait	Mengoptimalkan alur birokrasi penyaluran dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	4 (Rendah)
		RO.02.27	Kesalahan penghitungan Dana Bagi Hasil ke Kab/Kota	peningkatan kemampuan SDM dan jalinan koordinasi yang baik antara para pihak terkait	Mengadakan koordinasi internal untuk peningkatan kapasitas SDM serta melakukan verifikasi berjenjang terhadap rumus dan data dasar penghitungan DBH.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4tdufEz">https://bit.ly/4tdufEz</a>	3 (Rendah)

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
1	Penyusunan Standar Harga	RO.03.01	Adanya komponen barang dan jasa yang belum tercantum dalam Lampiran Pergub SSH dan SBU	OPD dilibatkan dalam memetakan data barang dan jasa yang akan disurvey, maupun dalam penyusunan Pergub SHBJ	Melakukan koordinasi dengan TAPD dan OPD untuk memetakan kebutuhan barang dan jasa yang akan dimasukkan ke dalam SK Gub SHBJ	Januari - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	6 (Sedang)
		RO.03.02	Harga barang dan jasa yang tercantum dalam lampiran Pergub SHBJ lebih rendah dari harga pasar	Perubahan tarif standar harga dan perubahan DPA melalui mekanisme Pergeseran Anggaran maupun Perubahan APBD	Belum ada perubahan SHS	Januari - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	6 (Sedang)
		RO.03.03	Tidak terdapat standar tarif jasa, contoh uang hadiah/pembinaan	- Desk kepada OPD yang mengajukan usulan tarif jasa dalam komponen SBU - TAPD membuat kriteria/standar tarif	Melakukan desk atas usulan OPD dengan mengundang TAPD	Januari - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
		RO.03.04	Adanya double atau multi standart dalam SSH maupun SBU	Desk kepada OPD yang mengajukan usulan tarif Standar Harga	Melakukan desk atas usulan OPD dengan mengundang TAPD	Januari - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	RO.03.05	Tidak tepat waktu dalam penyelesaian penyusunan RKBMD.	Menginstruksikan pengurus barang untuk berkoordinasi internal dengan perencana, terkait Usulan Program Kegiatan serta Rencana Barang pada usulan RKBMD dengan mengacu pada tatakala waktu penyusunan RKBMD sesuai surat Edaran	Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026.	Februari 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
		RO.03.06	RKBMD disusun belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya.	Melaksanakan Koordinasi dan Penelaahan atas usulan RKBMD OPD dengan mengacu pada Renja OPD dan memperhatikan kebutuhan barang dan ketersediaan barang ada dengan mengacu pada standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.	Berkoordinasi dengan Pihak pengembang Aplikasi RKBMD terkait kesiapan pelaporan RKBMD yg akan disusun.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	RO.03.07	Data Aset Tetap dan Persediaan yang disajikan selalu berubah-ubah.	Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan Aplikasi dan rapat rekonsiliasi secara daring/luring dengan Pengurus Barang OPD dalam rangka ketepatan/keakuratan penyajian data pelaporan barang pengguna triwulan, semester dan tahunan	- Melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah aset tetap dan persediaan Triwulan IV Tahun 2025 bersama dengan OPD - Berkoordinasi dengan Pihak pengembang Aplikasi Aset Tetap dan Persediaan terkait kesiapan pelaporan BMD yg akan disusun.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	RO.03.08	Aset tidak tercatat atau tidak terdokumentasi secara akurat, hilang/dicuri selama proses inventarisasi, tdk dpt diidentifikasi/tdk dpt dilacak	Implementasi sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, pengembangan prosedur inventarisasi yang jelas dan transparan, pelatihan bagi petugas inventarisasi tentang integritas dan etika.	Menyusun Petunjuk Teknis Inventarisasi BMD Tahun 2026	Januari 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	RO.03.09	- Tanah dan Bangunan milik Pemda DIY yang status kepemilikannya belum sah dalam hal ini sertifikat	- Pelaksanaan kontrol dan proses sertifikasi terhadap tanah pemda DIY	Melaksanakan proses pensertifikatan tanah	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
		RO.03.10	- Gedung Kantor yang tidak termonitor secara rutin berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan	- Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan	Melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan dan melaksanakan pengamanan BMD	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
		RO.03.11	- Kondisi bangunan yang rentan kerusakan karena faktor umur konstruksi	- Pelaksanaan kontrol dan penilaian kondisi bangunan rumah dinas oleh instansi yang berwenang untuk menentukan langkah pengamanan pemeliharaan bangunan rumah dinas	Melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan dan melaksanakan pengamanan BMD	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
		RO.03.12	kerusakan BMD atau kehilangan BMD	Konsisten dalam Menyediakan Asuransi BMD untuk kendaraan dinas roda empat dan Bangunan Gedung Pemerintah	Identifikasi calon objek asuransi BMD	Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
6	Penilaian Barang Milik Daerah	RO.03.13	- Pemanfaatan barang milik daerah tidak optimal	- Dilaksanakan koordinasi dengan OPD di Pemda DIY terkait optimalisasi aset pada OPD dan Pengelolaan BMD agar lebih berdaya guna dan bermanfaat serta penilaian ulang terhadap BMD	Rakor Optimalisasi BMD dengan Pengguna Barang dan peninjauan lapangan bersama pengguna barang	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	RO.03.14	Barang Milik Daerah yang tidak laku dalam proses penjualan	Melakukan evaluasi dan penilaian ulang terhadap BMD yang tidak laku dalam proses penjualan.	Penilaian kembali dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menilai ulang BMD berupa kendaraan dinas operasional yang tidak laku terjual	Jan - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
		RO.03.15	Hasil penilaian BMD yang dilaksanakan oleh Penilai Publik/KJPP dimungkinkan lebih tinggi dari daya beli masyarakat/calon pembeli	Koordinasi dengan pihak KJPP, untuk dapat mempertimbangkan faktor eksternal (seperti faktor lingkungan, biaya bongkar dan kondisi perekonomian) pada saat proses penilaian	Memberikan masukan kepada KJPP terkait dengan faktor-faktor apa saja yang selama ini menjadi pertimbangan calon pembeli dalam memutuskan pembelian BMD.	Jan - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	6 (sedang)
		RO.03.16	BMD yang dilakukan pemindahtanganan/penjualan jumlahnya terbatas, tergantung usulan dari OPD	Koordinasi dengan OPD terkait rencana usulan penghapusan BMD seawal mungkin	Mengeluarkan SE Usulan Pemindahtanganan seawal mungkin	Jan - April 2026	<a href="https://bit.ly/47wTiu7">https://bit.ly/47wTiu7</a>	4 (rendah)

#### PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	RO.04.01	Pelaksanaan Pelayanan Kesamsatan di SAMSAT Corner terhambat	pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap tahun anggaran	Pemeliharaan Sarpras dan Jaringan	Sepanjang tahun anggaran	<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	8 (sedang)
		RO.04.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Target Anggaran Pendapatan Daerah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tatakala waktu yang ditentukan	Penyusunan RKA Pendapatan dibuat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan akurat sesuai perencanaan yang sudah dilakukan	pencermatan rencana target pendapatan tahun 2027	Maret dan April	<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	8 (sedang)
		RO.04.03	Penyusunan Raperda Lain-lain PAD yang syah Terlambat	Tata kala waktu penyusunan NA diseuaikan dengan rencana pengajuan Raperda			<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	

No	Nama Sub Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko setelah pelaksanaan RTP
		RO.04.04	Penyusunan Dokumen Rencana Pendapatan untuk RPJMD 2027-2032 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tata kala waktu yang ditentukan	Tata Kala Waktu Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, LLPADyS 2027-2032 disesuaikan dengan tatakala penyusunan RPJMD 2027 - 2032	-	-	-	-
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	RO.04.05	Penundaan salurnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.	Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat (DJPK, DJPb, KPPN) dan OPD penerima dana transfer	Rekonsiliasi DBH CHT dan sosialisasi PPH 21	Februari 2026	<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	8 (sedang)
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	RO.04.06	Kebijakan Perpajakan Pusat Daerah Tidak terinfokan ke Masyarakat secara maksimal	Melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui Sosialisasi, Program Televisi Talkshow, Siaran Langsung Radio, dan Billboard tentang Pajak Penghasilan seperti isu saat ini yaitu pelaporan SPT Tahunan melalui coretax	Publikasi perpajakan pusat dan daerah	Februari 2026	<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	8 (sedang)
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	RO.04.07	Pengelolaan retribusi pada OPD berpendapatan belum maksimal	melakukan koordinasi dengan OPD untuk menganalisa tarif dan melakukan perubahan tarif melalui peraturan gubernur	Rekonsiliasi pendapatan daerah bersama dengan OPD berpendapatan setiap awal bulan	Januari – Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	8 (sedang)
5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	RO.04.08	penggunaan kanal digital untuk pembayaran retribusi daerah hanya mengalami sedikit peningkatan	melakukan koordinasi dengan BPD untuk menambah kanal-kanal digital agar lebih memudahkan wajib retribusi dalam melakukan transaksi retribusi	Rapat evaluasi indeks etpd semester 2 tahun 2025	Januari 2026	<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	8 (sedang)
		RO.04.09	Pelaksanaan Pelayanan Kesamsatan Terhambat	Melakukan pemeliharaan jaringan secara teratur setiap tahun	pemeliharaan jaringan kesamsatan dilakukan sepanjang tahun	Januari – Maret 2026	<a href="https://bit.ly/4dSS7sK">https://bit.ly/4dSS7sK</a>	8 (sedang)

c. Pelaksanaan atas Respon Terhadap Risiko Kecurangan

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan	
<b>A.</b>	<b>PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI PERANGKAT DAERAH</b>						
1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa	Memberikan atau menerima suap maupun gratifikasi kepada instansi pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbal balik tertentu	Pemberian Surat Peringatan	Meningkatkan fungsi pengawasan dan berjenjang, serta melakukan pengadaan dengan mekanisme E-Purchasing	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
2	Pengelolaan anggaran belanja daerah	Conflict of interest atau adanya konflik kepentingan antara beberapa pihak	Pemberian Surat Peringatan	Melakukan proses Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan regulasi Permendagri tentang Penyusunan APBD TA 2026	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	9 (sedang)
		Memberikan atau menerima suap maupun gratifikasi kepada instansi pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbal balik tertentu	Pemberian Surat Peringatan	Menerbitkan Surat Permohonan Penyusunan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan BLUD DIY dan melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
		Memberikan atau menerima suap maupun gratifikasi kepada instansi pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbal balik tertentu	Pemberian Surat Peringatan	Melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota khususnya di Triwulan 1 pada kegiatan/sub kegiatan bersumber dana Dana Keistimewaan bersama Paniradya (sebagai salah satu tahapan untuk persiapan redesign tahap 1)	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	12 (tinggi)

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan	
		Memberikan atau menerima suap maupun gratifikasi kepada instansi pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbal balik tertentu	Pemberian Surat Peringatan	- Monitoring dan Evaluasi pada SMKN 1 Kalasan dan SMKN 2 Depok. - Melaksanakan pendampingan penyusunan pelaporan keuangan BLUD.	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
		Memberikan atau menerima suap maupun gratifikasi kepada instansi pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbal balik tertentu	Pemberian Surat Peringatan	- Pembahasan permasalahan BUKP DIY. - Pelaksanaan audit KAP atas BUKP DIY masih dalam proses.	Januari-Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
3	Pemungutan Tarif tidak sesuai Regulasi	Penerimaan yang dilaporkan secara tidak wajar	Pemberian Surat Peringatan	Melaksanakan pembinaan kepada SKPD Berpendapatan dalam hal ini bendahara penerimaan melalui rekonsiliasi pendapatan yang dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan	Setiap awal bulan	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
4	Pendapatan Tidak Disetorkan	Penggelapan	Pemberian Surat Peringatan	Melaksanakan pembinaan kepada SKPD Berpendapatan dalam hal ini bendahara penerimaan melalui rekonsiliasi pendapatan yang dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan	Setiap awal bulan	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
5	Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi Tidak Sesuai	Conflict of interest atau adanya konflik kepentingan antara beberapa pihak	Pemberian Surat Peringatan	Koordinasi dan pembinaan melalui rapat pembinaan dan pencermatan usulan perubahan tarif dan atau objek pendapatan baru	Januari, Februari	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Ketidakwaian pengungkapan keuangan lainnya	Pemberian Surat Peringatan	Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersusun sesuai data aplikasi SAKTI	Bulan Februari 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	3 (rendah)

No	Deskripsi Resiko Kecurangan		Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan
7	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Ketidakwajaran pengungkapan keuangan lainnya	Pemberian Surat Peringatan	akan dilaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lintas sektor	akan dilaksanakan di TW 2	-	3 (rendah)
8	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ketidakwajaran pengungkapan keuangan lainnya	Pemberian Surat Peringatan	Laporan Keuangan UnAudited Pemda DIY TA 2025 sudah diserahkan kepada BPK untuk dasar pemeriksaan atas LK Pemda oleh BPK	Februari 2026	-	3 (rendah)
9	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Ketidakwajaran pengungkapan keuangan lainnya	Pemberian Surat Peringatan	akan dilakukan validasi berdasarkan jurnal audited BPK	Akan dilaksanaka di TW 3	-	3 (rendah)
10	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ketidakwajaran pengungkapan keuangan lainnya	Pemberian Surat Peringatan	akan dilakukan validasi berdasarkan jurnal audited BPK	akan dilaksanakan di TW 2	-	3 (rendah)
11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penggelapan	Ganti Rugi	akan dilakukan validasi jurnal berdasarkan nominal yang sudah disetorkan ke rekening kas daerah	akan dilaksanakan di TW 2	-	3 (rendah)

No	Deskripsi Resiko Kecurangan		Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan
12	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Memberikan atau menerima suap maupun gratifikasi kepada instansi pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbal balik tertentu	Ganti Rugi	pengadaan akan dilakukan melalui sistem e-purchasing	akan dilaksanakan di TW 4	-	6 (Sedang)
13	Tugas Perencanaan : Menyusun rencana kebutuhan aset, mengidentifikasi kebutuhan, dan menentukan prioritas. Fungsi Administrasi: Mengelola dokumen dan data aset.	Penyimpangan dalam kaitannya dengan persediaan dan aset berwujud lainnya	Melaksanakan Koordinasi dan Penelaahan atas usulan RKBMD OPD dengan mengacu pada Renja OPD dan memperhatikan kebutuhan barang dan ketersediaan barang ada dengan mengacu pada standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.	Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	4 (rendah)
		Conflict of interest atau adanya konflik kepentingan antara beberapa pihak	Pemberian Surat Peringatan	dilakukan rekonsiliasi dengan KPP dan KPPN	pelaksanaan akan dilaksanakan setiap akhir semester	-	4 (rendah)
<b>B.</b>	<b>TRANSAKSI KEUANGAN</b>						
1	Transaksi keuangan mencakup segala aktivitas keuangan yang terjadi di dalam entitas pemerintah daerah, mulai dari penerimaan dan pengeluaran dana hingga pelaporan keuangan. Risiko fraud	Penerimaan yang dilaporkan secara tidak wajar	Pemberian Surat Peringatan	Melakukan verifikasi berjenjang dan rekonsiliasi setiap bulan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)

No	Deskripsi Resiko Kecurangan		Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan
	dalam transaksi keuangan dapat melibatkan manipulasi laporan keuangan, penyelewengan dana, atau penyalahgunaan kebijakan pengeluaran. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk memiliki prosedur keuangan yang jelas, sistem pengawasan internal yang efektif, serta audit keuangan yang berkala.	Biaya atau Beban yang dilaporkan secara tidak wajar	Pemberian Surat Peringatan	Melakukan verifikasi berjenjang dan rekonsiliasi setiap bulan	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
2	Pelaporan Realisasi Pendapatan Daerah Tidak Sesuai	Penerimaan yang dilaporkan secara tidak wajar	Pemberian Surat Peringatan	Melaksanakan pembinaan kepada SKPD Berpendapatan dalam hal ini bendahara penerimaan melalui rekonsiliasi pendapatan yang dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan	Setiap awal bulan		6 (sedang)
3	Tugas keuangan mencakup segala aktivitas keuangan, mulai dari penerimaan dan pengeluaran dana hingga pelaporan keuangan.	Menyembunyikan Penerimaan maupun Pengeluaran ilegal.	Pemberian Surat Peringatan	Melakukan Inventarisasi Aset tidak tercatat atau tidak terdokumentasi secara akurat, hilang/dicuri,tdk dpt diidentifikasi/tdk dpt dilacak	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	4 (rendah)
<b>C.</b>	<b>PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan	
1	<p>Pengadaan barang dan jasa sering menjadi area yang rentan terhadap risiko fraud, seperti korupsi dalam bentuk suap atau kolusi. Prosedur pengadaan yang tidak transparan atau kurangnya persaingan dalam proses tender dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengadaan yang jelas, proses tender yang adil, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah dan mendeteksi tindakan fraud dalam pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>Memberikan atau menerima suap maupun gratifikasi kepada instansi pemerintah maupun swasta dengan tujuan mendapatkan imbal balik tertentu</p>	<p>Rotasi atau Mutasi</p>	<p>Adanya pemisahan tugas antara pejabat pengadaan, tim teknis pengadaan, pengurus barang, dan bendahara pengeluaran, sehingga dijabat oleh pegawai yang berbeda. Pemisahan tugas tersebut dengan adanya SK Kaban Pejabat Pengadaan, SK Kaban Tim Teknis, SK Gub. Pengurus Barang, dan SK Gub. Bendahara.</p>	<p>Januari - Maret 2026</p>	<p><a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a></p>	<p>6 (sedang)</p>
		<p>Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>Pemberian Surat Peringatan</p>				
2	<p>Tugas Pengadaan: Mengadakan aset yang dibutuhkan, baik melalui pembelian, sewa, atau cara lain</p>	<p>Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<p>Pemberian Surat Peringatan</p>	<p>Melaksanakan pengadaan dengan berpedoman aturan tentang pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Januari 2026, Maret 2026</p>	<p><a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a></p>	<p>4 (rendah)</p>
D.	<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>						

No	Deskripsi Resiko Kecurangan		Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan
1	Sumber daya manusia mencakup kebijakan dan praktik terkait dengan manajemen pegawai dan pejabat pemerintah daerah. Risiko fraud dalam aspek ini dapat melibatkan praktik nepotisme, penerimaan suap, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses rekrutmen atau promosi. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk memiliki kebijakan SDM yang transparan, prosedur perekrutan yang adil, serta sistem evaluasi kinerja yang objektif.	Conflict of interest atau adanya konflik kepentingan antara beberapa pihak	Rotasi atau Mutasi	Mengevaluasi kinerja masing-masing pegawai secara berjenjang dan berkala, baik melalui penilaian pada E-Kinerja, maupun rekomendasi atasan dan rekan kerja masing-masing pegawai, apabila dirasa pegawai kurang optimal maka dapat dilakukan rotasi internal, sebagai penyegaran.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	4 (rendah)
2	Tugas Pengawasan dan Pengendalian: Mengawasi dan mengendalikan aset untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan Fungsi Pengawasan : Mengawasi dan mengendalikan aset.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pemberian Surat Peringatan	Pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan sesuai kontrak/surat pesanan	Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	4 (rendah)
<b>E. ASET DAN PERSEDIAAN</b>							

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan	
1	Aset dan persediaan melibatkan manajemen, pengawasan, dan pengendalian terhadap barang milik pemerintah daerah. Risiko fraud dalam aspek ini dapat mencakup penggelapan atau penyalahgunaan aset, manipulasi persediaan, atau pencurian. Sistem kontrol internal yang kuat, inventarisasi reguler, dan pelacakan yang cermat terhadap aset dan persediaan menjadi kunci untuk mengurangi risiko tindakan fraud.	Penyimpangan dalam kaitannya dengan persediaan dan aset berwujud lainnya	Pemberian Surat Peringatan	Adanya pakta integritas dan berita acara pemakaian BMD untuk kendaraan dinas operasional bagi pegawai yang bertanggungjawab terhadap pemakaian BMD tersebut.	Januari - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
		Menyembunyikan/penyalahgunaan Aset.	Rotasi atau Mutasi	Kendali terhadap penggunaan voucher BBM dengan sistem "petty cash" per bidang agar terpantau pemakaian voucher sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan, kendali langsung dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum	Januari - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	8 (sedang)
		Penyimpangan dalam kaitannya dengan persediaan dan aset berwujud lainnya	Pemberian Surat Peringatan	Melakukan pemisahan tugas dan fungsi, antara fungsi pembelian, menerima barang, dan pencatatan akuntansi	Januari - Desember 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	8 (sedang)
4	Tugas Penggunaan dan Pemeliharaan: Mengoptimalkan penggunaan aset, melakukan pemeliharaan, dan memastikan aset dalam kondisi baik. Fungsi Penggunaan dan pemeliharaan : Aset tidak digunakan, pemeliharaan tidak sesuai	Penyimpangan dalam kaitannya dengan persediaan dan aset berwujud lainnya	Dilaksanakan koordinasi dengan OPD di Pemda DIY terkait optimalisasi aset pada OPD dan Pengelolaan BMD agar lebih berdaya guna dan bermanfaat serta penilaian ulang terhadap BMD	Koordinasi dengan OPD melalui Rapat Koordinasi	Januari 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	4 (rendah)

No	Deskripsi Resiko Kecurangan		Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan
5	<p>Tugas Penghapusan dan Pemindahtanganan: Menghapus aset yang tidak dibutuhkan atau rusak, dan memindahtangankan aset yang tidak digunakan.</p> <p>Fungsi Penghapusan dan pemindahtanganan : Aset dihapus tanpa prosedur, aset dijual tanpa izin</p>	<p>Penyimpangan dalam kaitannya dengan persediaan dan aset berwujud lainnya</p>	<p>Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan Aplikasi dan rapat rekonsiliasi secara daring/luring dengan Pengurus Barang OPD dalam rangka ketepatan/keakuratan penyajian data pelaporan barang pengguna triwulan, semester dan tahunan</p>	<p>SE Pemindahtanganan dan penghapusan dikeluarkan untuk ditindaklanjuti oleh OPD</p>	<p>Januari - Maret 2026</p>	<p><a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a></p>	<p>6 (sedang)</p>
6	<p>Tugas Penyusunan Standar Barang dan, Jasa : Mengumpulkan data harga barang dan jasa dari berbagai sumber, Menganalisis data harga untuk menentukan harga standar, Menyusun draft SHBJ berdasarkan hasil analisis, Melakukan konsultasi dengan stakeholders terkait, Menyusun SHBJ yg final dan disetujui.</p> <p>Fungsi : menyediakan harga standar yang akurat dan transparan untuk proses pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>Mendorong atau membantu orang lain untuk melakukan fraud</p>	<p>OPD dilibatkan dalam memetakan data barang dan jasa yang akan disurvei, maupun dalam penyusunan Pergub SHBJ</p>	<p>Desk usulan SHBJ bersama-sama dengan OPD dan TAPD</p>	<p>Januari - Maret 2026</p>	<p><a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a></p>	<p>6 (sedang)</p>

No	Deskripsi Resiko Kecurangan		Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan
7	Manajemen risiko dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada dasarnya mencakup seluruh tahapan siklus BMD, dari perencanaan sampai pengawasan. Pada siklus pemanfaatan yakni Kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah	Penyimpangan dalam kaitannya dengan persediaan dan aset berwujud lainnya	Mendampingi dan memberikan masukan pada saat proses penilaian oleh Penilai Publik/KJPP. Faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, biaya bongkar dan kondisi perekonomian, untuk dapat dipertimbangkan	Memberikan masukan kepada KJPP terkait dengan faktor-faktor apa saja yang selama ini menjadi pertimbangan calon pembeli dalam memutuskan pembelian BMD.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	6 (sedang)
<b>F.</b>	<b>TEKNOLOGI INFORMASI</b>						
1	Peretasan Sistem Perpajakan	Fraud melalui pemanfaatan teknologi informasi	Pemberian Surat Peringatan	Pemeliharaan jaringan secara rutin, serta berkoordinasi dengan pengembang aplikasi, penerapan hak akses yang berjenjang terhadap sistem perpajakan sesuai dengan kewenangan.	sepanjang tahun		4 (Rendah)

No	Deskripsi Resiko Kecurangan		Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Terhadap Risiko Kecurangan
2	Peran teknologi informasi semakin besar dalam operasional pemerintah daerah. Perlunya keamanan sistem informasi yang kuat, pengawasan akses yang ketat, serta pelatihan bagi personel terkait teknologi menjadi kunci untuk mengurangi risiko fraud dalam teknologi informasi khususnya untuk bidang Aset dalam tugas Penerimaan dan Pencatatan yaitu Menerima aset, melakukan inventarisasi, dan mencatat aset dalam sistem.	Penyajian atau pengungkapan yang tidak wajar, terdapat beberapa akun dan kejadian yang harus dicermati	Secara rutin melaksanakan updating data BMD melalui pendampingan Aplikasi dan rapat rekonsiliasi secara daring/luring dengan Pengurus Barang OPD dalam rangka ketepatan/keakuratan penyajian data pelaporan barang pengguna triwulan, semester dan tahunan	Melaksanakan rekonsiliasi barang milik daerah aset tetap dan persediaan Triwulan IV Tahun 2025 bersama dengan OPD	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	4 (rendah)
3	Tugas Pelaporan dan Evaluasi: Menyusun laporan aset, melakukan evaluasi, dan meningkatkan pengelolaan aset Fungsi i: Mengelola dokumen dan data aset	Menyembunyikan Perolehan, Pelepasan, dan Penggunaan Aset yang ilegal.	Pendampingan dan rekonsiliasi secara rutin berkelanjutan dengan seluruh Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY	- Berkoordinasi dengan Pihak pengembang Aplikasi Aset Tetap dan Persediaan terkait kesiapan pelaporan BMD yg akan disusun. - Berkoordinasi dengan Pihak pengembang Aplikasi RKBMD terkait kesiapan pelaporan RKBMD yg akan disusun.	Januari - Maret 2026	<a href="https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD">https://bit.ly/BuktiDukungMRFRAUD</a>	4 (rendah)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

ꦧꦥꦏꦏ꧀ꦢꦶꦲꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦏꦺꦴꦁꦏꦂꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Ext. 1117  
Faksimile (0274) 564544 Pos-el: bpka@jogjaprov.go.id Laman: bpka.jogjaprov.go.id

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I Tahun 2026

1

Nama Unit : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Sasaran : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah

Risiko : Aplikasi Kesamsatan *down* dan tidak bisa diakses

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Resiko SPBE pada triwulan I teridentifikasi terdapat kemungkinan aplikasi kesamsatan *down* dan tidak bisa diakses yang disebabkan karena permasalahan yang sifatnya teknis, yaitu jaringan tidak stabil dan kerusakan pada server. Dengan adanya kejadian tersebut akan berdampak pada pelayanan online kesamsatan tidak bisa dimanfaatkan sehingga layanan publik terhenti.

Resiko SPBE tersebut pada Triwulan I berada pada level Resiko SPBE "Sangat Tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 20 di mana kemungkinan terjadinya Resiko SPBE tersebut dalam 1 tahun sebesar  $X \leq 5\%$  (hampir tidak terjadi) dan berdampak pada terhentinya layanan operasional organisasi  $> 80\%$  (sangat signifikan).

Penanganan yang telah dilakukan

Menitipkan Hosting dan Domain ke Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dan melakukan backup

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Back up data secara otomatis mirroring data setiap hari	Kepala BPKA DIY	Triwulan I

Yogyakarta, April 2026



Kepala

Wiyos Santoso, S.E, M.Acc











PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

بادان بنگلوا كواندان ائسٲت

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811 Ext. 1117  
Faksimile (0274) 564544 Pos-el: bpka@jogjaprovo.go.id Laman: bpka.jogjaprovo.go.id

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I Tahun 2026

6

Nama Unit : Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

Sasaran : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah

Risiko : Data yang diinput di aplikasi SI RKBMD tidak tersimpan secara otomatis

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Resiko SPBE pada triwulan I teridentifikasi terdapat kemungkinan Data yang diinput di aplikasi SI RKBMD tidak tersimpan secara otomatis, untuk beberapa saat harus menunggu dulu yang disebabkan karena permasalahan yang sifatnya teknis, yaitu Pembuatan database baru untuk fase RKBMD dan perubahan RKBMD setiap tahunnya, serta terdapat kemungkinan lupa belum dilakukan setting. Dengan adanya kejadian tersebut akan berdampak pada proses penyusunan RKBMD atau perubahan RKBMD menjadi terhambat.

Resiko SPBE tersebut pada Triwulan I berada pada level Resiko SPBE "Rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 7 di mana kemungkinan terjadinya Resiko SPBE tersebut dalam 1 tahun sebesar  $5\% < X \leq 10\%$  (jarang terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja 20% s.d 40% (kurang signifikan).

Penanganan yang telah dilakukan

Melakukan Trial & Error sebelum RKBMD dibuka aksesnya untuk semua user

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan pencermatan atas usulan RKBMD pada aplikasi SI RKBMD	Kepala BPKA DIY	Triwulan I

Yogyakarta, April 2026  
Kepala  
  
Wiyos Santoso, S.E, M.Acc





